

KOMPARASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2018
(Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)

By:

Santi Mulyana¹, Eny Inti Suryani², Goestyari Kurnia Amanta³
santi198@gmail.com, enyintisuryani@gmail.com

ABSTACK

The government has made various efforts to overcome these problems, launching several programs including the Family Hope Program (PKH) and the Urban Poverty Reduction Program (P2KP) both programs were launched with the hope of helping the poor meet their needs.

This study aims to compare the implementation of the Family Hope Program (PKH) and the Urban Poverty Reduction Program (P2KP) in reducing poverty in 2018 in Tanjung Karang District, Bandar Lampung City Center. Meanwhile, the research method uses descriptive analysis with a qualitative approach.

The results of the study show that: (1) The implementation of the Family Hope Program (PKH) has been running well and is quite influential in reducing the numbers which can be seen from the socialization of the PKH program that has been carried out thoroughly and routinely, PKH funding assistance can be carried out quickly and accurately. time and implementation of data implementation is carried out carefully, carefully and objectively. (2) The Urban Poverty Reduction Program (P2KP) is not running optimally so that it does not have an impact on reducing poverty as seen from the environmental/infrastructure (physical) empowerment program that still requires a thorough evaluation. Empowerment of business (economy) also cannot be implemented optimally. Human/community (social) empowerment programs that are implemented are still less effective.

Keyword: Family Hope Program (PKH), Urban Poverty Reduction Program (P2KP), Poverty

ABSTRAK

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, diantaranya meluncurkan beberapa program diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) kedua program tersebut di luncurkan dengan harapan dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam mengurangi angka kemiskinan Tahun 2018 pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Sementara itu metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah cukup berjalan dengan baik dan cukup berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan terlihat dari sosialisasi program PKH sudah dilaksanakan secara menyeluruh dan rutin, pencairan bantuan dana PKH dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu serta pelaksanaan verifikasi data dilakukan dengan cermat, hati-hati dan objektif. (2) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) masih kurang berjalan dengan maksimal sehingga tidak terlalu berdampak pada penurunan kemiskinan dilihat dari program pemberdayaan lingkungan/infrastruktur (fisik) masih memerlukan evaluasi secara menyeluruh. Pemberdayaan usaha (ekonomi) juga belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Program pemberdayaan manusia/masyarakat (sosial) yang dilaksanakan masih kurang efektif.

Kata Kunci: *Program Keluarga Harapan (PKH), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Kemiskinan*

Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan oleh sebab itu penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari tolak ukur untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, sehingga dengan demikian adanya penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam ekonomi sehingga harus diatasi atau paling tidak dikurangi.

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, sistematis dan masif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Angka kemiskinan pada bulan maret 2019 sebesar 25.95 juta jiwa atau 9.82% turun tipis dibandingkan bulan September 2018 sebesar 26.58 juta jiwa atau 10.12% penurunan jumlah penduduk miskin juga diikuti oleh penurunan

jumlah penduduk yang berada pada garis kemiskinan yaitu Maret 2019 penduduk miskin perkotaan mengalami penurunan sebesar 126.310 ribu orang yang sebelumnya pada September 2018 sebesar 128.200 ribu orang. Sedangkan untuk penduduk miskin pedesaan yang berada pada garis kemiskinan juga mengalami penurunan di Bulan Maret 2019 yaitu sebanyak 150.810 ribu orang dibandingkan dengan September 2018 yaitu sebesar 160.310 ribu orang, (BPS, 2019).

Melambatnya penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari kurang kuatnya upaya dari pemerintah dalam menekan angka kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi yang masih kurang stabil yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang terus menurun, termasuk di Provinsi Lampung sendiri, dimana Provinsi Lampung menempati urutan ke-3 (tiga) secara nasional dan urutan ke-8 (delapan) prosentase penduduk miskin Se-sumatera setelah Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Kecamatan Tanjung Karang Pusat merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung serta salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk cukup padat berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS diakhir tahun 2018 jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebanyak 53.722 jiwa dan ditahun 2019 jumlah penduduk meningkat menjadi 59.391 jiwa dengan kepadatan rata-rata 111 jiwa/Ha. Pemerintahan Kota Bandar Lampung merespons masalah kemiskinan tersebut dengan mengoptimalkan program nasional yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Kedua program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin, rendahnya kesejahteraan masyarakat serta rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kota Bandar Lampung melaksanakan PKH di seluruh kecamatan termasuk di Kecamatan Tanjung Karang Pusat untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga, tahun 2018 jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) calon peserta PKH di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung diketahui sebanyak 3.182 dan berkurang menjadi 1.281 setelah dilakukan validasi. Peserta PKH di bidang kesehatan antarlain ibu hamil sebanyak 227 orang, pemenuhan gizi dan imunitas bayi dan balita sebanyak 571 sisanya 483 orang diproyeksikan untuk mendapatkan bantuan di bidang pendidikan, (BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2019).

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang peneliti lakukan pada Tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2019 di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota

Bandar Lampung diketahui bahwa program PKH yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung sudah terealisasi namun masih perlu adanya optimalisasi yang terlihat dari masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung antusias dalam mendukung program PKH namun dari segi pengorganisasian masih ada permasalahan mulai dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping, pembayaran yang tidak tepat waktu serta pelaksanaan verifikasi yang cenderung masih ada kolusi sehingga membuat implementasi PKH di Kota Bandar Lampung terlihat kurang optimal.

Program lain yang digulirkan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), tujuan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Permasalahan yang timbul dari kedua program pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung relatif berbeda di mana permasalahan dari Program Keluarga Harapan (PKH) lebih kepada pengorganisasian mulai dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping dimana terlihat dari pertemuan awal dan validasi seharusnya kegiatan ini dilaksanakan di bulan September 2018 namun baru terealisasi di bulan Januari 2019 kegiatan awal digunakan untuk melakukan sosialisasi tentang penjelasan terkait dengan PKH, melakukan validasi data calon peserta PKH, dan mendapatkan komitmen calon peserta PKH melalui penandatanganan formulir validasi.

Pembayaran yang tidak tepat waktu diketahui bahwa pembayaran bantuan PKH di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dilaksanakan dalam empat tahap dan harus dibayarkan di bulan Januari, April dan Oktober 2018 namun faktanya pembayaran bantuan PKH baru bisa dicairkan oleh penerima bantuan di bulan Februari, April dan Agustus 2019. Kurang akuratnya pelaksanaan verifikasi calon peserta PKH yang dilakukan oleh pendamping hal itu terlihat dari masih banyaknya pendamping PKH di Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang melakukan verifikasi secara manual

pada hal pemerintah sudah menyiapkan aplikasi *mobile* untuk melihat apakah calon peserta PKH layak untuk diberikan Fasilitas Pendidikan (Fasdis), Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial (*Faskesos*) hal itu terjadi dikarenakan ada indikasi pedamping ingin memalsukan data penerima (manipulatif dan kolusi) yaitu kerabat, keluarga atau kelompok yang pendamping kenal.

Sementara itu permasalahan yang terdapat pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) lebih kepada pelaksanaan program oleh fasilitator serta kesadaran masyarakat dalam membantu fasilitator untuk mengoptimalkan program-program P2KP hal tersebut yang membuat target dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sulit untuk terwujud hal itu terlihat dari program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan pelatihan seperti pelatihan pemanfaatan dana bergulir, pelatihan keterampilan (*life skills*), pelatihan pemasaran hasil-hasil dari produksi, pelatihan keorganisasian, pelatihan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta pelatihan negosiasi untuk pengembangan UMKM tidak semua mampu dilaksanakan hanya program pelatihan pemanfaatan dana bergulir dan pelatihan keterampilan (*life skills*) yang selama ini di intensifkan oleh fasilitator sedangkan program yang lain sampai saat ini sama sekali belum dilaksanakan sementara itu pelaksanaan program tersebut juga hanya terpusat di Kelurahan Kaliawi dan Kaliawi Persada pada hal Kecamatan Tanjung Karang Pusat ada 7 (tujuh) Kelurahan jika dilihat dari segi angka kemiskinan jumlahnya merata dan hampir sama seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh kelurahan sehingga terjadi pemerataan.

Pemberdayaan lingkungan atau pembangunan dan perbaikan infrastruktur mulai dari pembuatan MCK komunal untuk masyarakat miskin, pelebaran drainase di sekitar pemukiman masyarakat miskin, penambahan sarana usaha serta perbaikan rumah layak huni (mahyani) atau bedah rumah semua sudah dijalankan namun hasilnya masih jauh dari kata optimal misalnya perbaikan dan pembuatan MCK komunal sampai dengan akhir tahun 2018 pembuatan dan perbaikan MCK komunal untuk masyarakat miskin tidak semua kelurahan mendapatkan program tersebut dari 7 (tujuh) kelurahan hanya Kelurahan Kaliawi dan Kaliawi Persada yang mendapatkan program pembangunan MCK komunal pada hal dari laporan fasilitator dari 7 (tujuh) kelurahan ada sekitar 271 keluarga yang tidak memiliki MCK yang layak dan sehat. Sementara itu dilihat dari program perbaikan rumah layak huni (mahyani) atau bedah rumah sampai diakhir tahun 2018 kegiatan bedah rumah di Kecamatan Tanjung Karang Pusat hanya mencapai 150-200 unit pada hal berdasarkan data BPS Tahun 2018 rumah yang tidak layak huni dengan kategori miskin, miskin

sekali dan paling miskin mencapai 3.710 rumah pada hal dana yang sudah di keluarkan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan program ini mencapai Rp.4.5 Milyaar dengan rata-rata penerima bantuan sebesar Rp.10.000.000.00 – Rp. 15.000.000.00.

Kajian Pustaka

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan adalah suatu, yaitu pendidikan dan kesehatan. Menurut Sukoco (2007:27), Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Struktur organisasi PKH terdiri dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/kota, dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan. UPPKH Kecamatan melaporkan setiap bulan kepada UPPKH Kabupaten/kota, yang nantinya akan dilaporkan kepada UPPKH Pusat yang berada di Jakarta.

PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, aktor utamanya adalah dari Dinas Sosial, kemudian dibantu oleh BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PT. Pos Indonesia, Departemen Komunikasi dan Informasi, Kantor PKH kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Masyarakat dengan demikian, PKH membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang mengintervensi sisi pelayanan (*supply*) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (*demand*) dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta antar pemangku kepentingan (*stakeholder*).

b. Latar Belakang Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Menurut Tim P2KP (2014:1), pengertian pengentasan kemiskinan di perkotaan adalah suatu program pengentasan kemiskinan yang mampu memperluas prospek dan pilihan untuk dapat hidup dan berkembang di masa depan, khususnya bagi masyarakat miskin di perkotaan. Pengentasan kemiskinan di perkotaan menekankan pada pentingnya proses pembangunan kapasitas institusi lokal (*local building*) sebagai inti dan penggerak sekaligus agen sosial pembangunan di masing-masing komunitas.

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan terdahulu, umumnya melihat persoalan kemiskinan pada tataran gejala-gejala yang tampak dari luar atau hanya melihat dari satu sisi saja, seperti kurangnya modal, tidak memiliki ketrampilan, rendahnya asset, dan lainnya. Sehingga pendekatan yang dilakukan cenderung bersifat parsial, sektoral dan *charity* tidak heran apabila kemudian sering dijumpai berbagai kondisi kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, penyalahgunaan dana dan wewenang serta penyimpangan. Implikasi dari pendekatan tersebut tidak hanya akan mengakibatkan ketidakmampuan menjawab tantangan pengentasan kemiskinan secara komprehensif, tetapi justru akan lebih memperpuruk kondisi kehidupan masyarakat, terutama menyuburkan ketergantungan masyarakat pada bantuan luar, menumbuhkan benih-benih fragmentasi sosial di tatanan masyarakat (saling curiga, saling tidak percaya, saling menyalahkan, dan lain-lain) serta melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan, dan lain-lain).

Salah satu indikator dari tatanan masyarakat madani adalah kelembagaan masyarakat yang kokoh. Lembaga masyarakat yang benar-benar mampu berperan menjadi wadah perjuangan masyarakat, terutama kaum miskin, khususnya dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka maupun dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal. Artinya, lembaga masyarakat tersebut mampu menjadi motor penggerak masyarakat untuk berbagai upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan permukiman secara berkelanjutan.

Melalui keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tersebut diharapkan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak padalingskaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

c. Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum

pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Batas pemenuhan kebutuhan minimum mengacu pada rekomendasi Widya Karya Nasional dan Gizi pada tahun 1978, yaitu nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori per orang setiap harinya. Sedangkan kebutuhan non pangan mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

Lembaga Penelitian SMERU (2011:1), menyatakan pengertian lain kemiskinan yakni sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan alat produksi, kemiskinan terkait pula dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Suyanto (2015:59), mendefinisikan kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan, keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu *sudah takdir* dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai surat nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Kartasasmita dimana dalam teori dapat diberikan kesimpulan bahwa kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok (utama), yang disebabkan oleh akibat sampingan dari suatu kebijaksanaan yang tidak dapat dihindari sehingga menjadi akar kemiskinan dan akan mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk lapisan masyarakat bawah yang membawa pada gejala kemiskinan yang bersifat multidimensional, karena dalam kenyataannya berurusan juga dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya dan politik).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan menurut obyek yang disebut sebagai kasus yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

1) Pelaksanaan Sosialisasi oleh Pendamping

Hasil observasi penelitian diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi sudah dilaksanakan di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping kepada calon peserta PKH meliputi penjelasan tentang PKH, siapa yang berhak mendapatkan bantuan PKH dan kewajiban peserta PKH dan lain-lain semua materi sudah diberikan oleh pendamping kepada masyarakat calon penerima PKH.

Informasi dari informan dapat diketahui bahwa sosialisasi program PKH oleh pendamping dan unsur terkait sudah dilaksanakan dengan baik sehingga peserta PKH memahami maksud dan tujuan program PKH, hak dan kewajiban peserta PKH, syarat yang berhak mendapatkan bantuan program PKH, mekanisme pengaduan dalam program PKH serta sanksi yang akan diterima oleh peserta PKH ketika ada penyalahgunaan dana PKH dan manipulasi data demi mendapatkan bantuan PKH. Sementara itu sosialisasi program di lakukan di rumah-rumah kepala lingkungan maupun di seluruh kantor kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Dengan adanya sosialisasi program PKH maka masyarakat memiliki cukup informasi terkait dengan PKH sehingga masyarakat betul-betul menggunakan bantuan program PKH dengan baik sesuai dengan rekomendasi yang sudah diberikan oleh pendamping PKH.

2) Pencairan Bantuan

Bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria Program Keluarga Harapan (PKH). Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan sendiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan. Berdasarkan hasil observasi penelitian diketahui bahwa pencairan bantuan program PKH sudah dilaksanakan dengan tepat waktu dan disesuaikan dengan jumlah bantuan yang akan diterima oleh peserta PKH, mengenaik besar kecilnya bantuan dana PKH.

Informasi dari informan dapat diketahui bahwa dalam proses pencairan bantuan dana PKH baik kesehatan maupun pendidikan peserta PKH selalu diberikan bantuan oleh pendamping sehingga peserta PKH tidak kesulitan dalam proses pencairan melalui ATM yang disediakan oleh bank, selain itu dengan adanya koordinasi yang baik antara pendamping dengan pihak operator bank data-data peserta PKH dapat di input dengan cepat tanpa harus mengantri lama sehingga antrian di bank berjalan dengan lancar dan kondusif.

3) Akuratnya Pelaksanaan Verifikasi Peserta PKH

Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) setiap ada perubahan. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bekerjasama dengan ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memeriksa perubahan data terkait. Setelah data dilakukan pemuktahiran peserta PKH selanjutnya pendamping melakukan evaluasi hal tersebut yang membua pesera PKH mengalami perubahan bahkan pembatalan.

Informasi hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi data peserta PKH dilakukan dengan cermat, hati-hati dan objektif hal itu dilakukan agar data yang masuk dan akan menerima bantuan betul-betul akurat dan tepat sasaran tidak ada kolusi ataupun manipulasi data peserta PKH.

b. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

1) Kegiatan Pendampingan Program Oleh Fasilitator

Kegiatan pendampingan dalam program pemberdayaan masyarakat sering berjalan kurang maksimal dikarenakan kurangnya koordinasi antara pendamping dengan insitusi terkait mulai dari kelurahan, kecamatan sampai dengan pemerintah daerah bahkan kurang maksimalnya koordinasi juga sering terliha antara pendamping dengan masyarakat sasaran program P2KP. Seperti halnya hasil observasi penelitian yang peneliti lakukan di Kelurahan Kaliawi dan Kelurahan Kaliawi Persadana hasil observasi menunjukkan bahwa pendampingan program P2KP yang terdiri bidang ekonomi, bidang fisik/infrastruktur dan sosial masih kurang berjalan dengan maksimal sehingga ketiga program tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan informasi dari informan dapat diketahui bahwa kegiatan pendamping tidak dilakukan secara kontinyu dan komprehensif hal itu terlihat dari kegiatan pendampingan hanya dilakukan 3 kali dalam setahun untuk masing-masing kelompok artinya dalam satu tahun hanya ada satu kali pemberian pembekalan oleh fasilitator. Pada hal program P2KP merupakan program yang paling lama di implementasikan oleh pemerintah daerah termasuk Kota Bandar Lampung seharusnya permasalahan kurangnya fasilitaor bisa secepatnya di atasi sehingga tidak mempengaruhi optimalisasi program-program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada bidang ekonomi pembentukan kelompok usaha mikro dan pemberian modal bergulir, pembangunan infrastruktur mulai drainase, paving blok, MCK komunal dan perbaikan rumah layak huni (mahyani) serta bidang sosial yang meliputi pendidikan dan pelatihan keterampilan memiliki prospek yang baik untuk menurunkan angka kemiskinan.

2) Partisipasi Masyarakat untuk Mengikuti Program

Peran warga masyarakat khususnya masyarakat di tujuh kelurahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung masih perlu untuk di tingkatkan khususnya peran warga dalam bentuk fisik berupa sumbangan pendanaan dimana sebagian warga masyarakat di kelurahan enggan untuk memberikan sumbangan penghasilan untuk kegiaan pembangunan seperti perbaikan saluran air bersih dan perbaikan jalan aau pavingisasi. Selain dalam bentuk sumbangan pendanaan yang kurang kesadaran untuk berpartisipasi dalam bentuk kerja bakhti atau gotong royong juga masih perlu di tingkakan hal itu terlihat dari

banyaknya warga masyarakat yang tidak hadir ketika dimintai untuk kerja bakhti dalam pembangunan proyek program P2KP

Hasil observasi diketahui bahwa partisipasi masyarakat di bidang ekonomi atau bidang usaha relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan partisipasi masyarakat di bidang fisik hal itu terlihat dari kegiatan pengajuan dana dan keterlibatan UPK. Penyaluran dana bergulir di masing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dikelola oleh BKM. Realisasi dana bergulir yang diterima oleh masyarakat masing-masing kelompok berkisar antara Rp.2.500.000,00 sampai Rp.3.500.000,00.

Pelaksanaan pemberian dana bergulir kepada masyarakat disosialisasikan melalui pengurus PKK, Pengurus RT, pengurus lingkungan, adapun sosialisasi tersebut meliputi tata cara penyusunan proposal, penentuan dana yang diajukan. Proposal yang telah dibuat selanjutnya disampaikan kepada UPK untuk dikonsultasikan, selanjutnya UPK mengajukan kepada BKM untuk diadakan pembahasan.

Dari wawancara di atas terlihat bahwa bantuan dana bergulir P2KP telah dapat dimanfaatkan oleh sebagian warga masyarakat di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, dengan dana bergulir masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam pengembangan usaha yang telah dilakukan sebelumnya, namun karena kekurangan modal maka sebagian masyarakat terhenti dari kegiatan usahanya.

Selain itu dengan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha (ekonomi) melalui P2KP masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung telah berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dengan melakukan berbagai usaha, walaupun menurut pengakuan pengurus BKM masih terdapat kendala-kendala yaitu, sering terjadi kelambatan angsuran dari Kelompok Swadaya Masyarakat, dan UPK terpaksa harus mendatangi ke KSM yang belum mengangsur, namun hal tersebut dirasa wajar.

3) Realisasi Program

Berdasarkan informasi dari informan dapat diketahui bahwa program pemberdayaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

Kota Bandar Lampung melalui tim P2KP Kecamatan Tanjung Karang Pusat masih memerlukan evaluasi secara menyeluruh mengingat program-program yang direalisasikan banyak yang tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun serta harapan dari masyarakat kalangan miskin, paling miskin dan miskin sekali, pada hal ketika program pemberdayaan lingkungan berjalan dengan baik maka kualitas lingkungan pemukiman masyarakat yang tergolong miskin, paling miskin dan sangat miskin tetap terjaga dengan baik sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan aman serta kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat khususnya masyarakat penerima bantuan program pemberdayaan pemerintah.

Informasi hasil penelitian di atas maka dapat di ketahui bahwa pemberdayaan usaha yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sebetulnya sudah baik di mana pemerintah membuat beberapa program pemberdayaan usaha mulai dari pengembangan usaha ekonomi kreatif, membuat kelompok usaha dengan 4 usaha yang berbeda yaitu usaha ekstraktif, usaha budidaya perikanan dan peternakan, usaha industri dan usaha perdagangan serta memberikan dana bergulir kepada kelompok perempuan untuk mengembangkan usaha ataupun menciptakan usaha. Namun kegiatan pemberdayaan usaha tersebut masih memerlukan evaluasi hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yang di hadapi mulai dari bantuan usaha yang tidak merata untuk masyarakat miskin, kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator P2KP yang membuat banyak program pemberdayaan usaha tidak berjalan bahkan berhenti serta kurang pahamiannya masyarakat penerima bantuan pemberdayaan masyarakat hal itu terlihat dari banyak masyarakat yang tidak mengembalikan dana bergulir atau masyarakat yang mengebalikan dana bergulir dengan tidak tepat waktu sehingga kegiatan pemberdayaan melalui dana bergulir tidak berjalan sesuai dengan target dan harapan dari pemerintah daerah.

Sementara itu program pemberdayaan masyarakat (sosial) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung melalui Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Tanjung Karang Pusat masih kurang efektif di mana upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih hanya sebatas peningkatan keterampilan dan pengetahuan tetapi tidak ada upaya *supporting* program dari fasilitator P2KP hal itu terlihat dari kurangnya kegiatan

pendampingan oleh fasilitator kepada masyarakat sasaran program sehingga menimbulkan masyarakat kurang terampil, kurang memiliki pemikiran yang inovatif serta kurangnya inisiatif yang dimiliki oleh masyarakat sasaran program P2KP dalam menjalankan program-program yang sudah diberikan walaupun masyarakat sudah menerima/mengikuti kegiatan pelatihan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang komparasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam mengurangi angka kemiskinan tahun 2018 Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengorganisasian dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) masih berjalan hingga kini memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan hal itu terlihat dari hasil program PKH pada meningkatkan kesehatan dan pendidikan yang tepat sasaran
- b. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung masih belum terlihat hasilnya dalam waktu dekat ini karena program yang diberikan untuk jangka panjang. Hal ini dikarenakan program yang baru di lingkungan di tahun 2018 sehingga membutuhkan waktu untuk melihat dan mencoba manfaatnya.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Tim UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) sebaiknya dapat turun langsung untuk menyosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada warga yang ada di seluruh kelurahan dengan cara menyebarluaskan brosur PKH, agar warga mengerti apa itu PKH serta sarasannya, sehingga warga tidak menjadi salah paham selain itu, selain itu pendataan calon peserta PKH sebaiknya menggunakan data yang *up to date* dengan melakukan pendataan ulang terhadap warga yang tergolong sebagai keluarga sangat miskin melalui kerja sama dengan pihak kelurahan untuk memperoleh data terbaru sehingga program PKH dapat disalurkan tepat sasaran
- b. Perlu sebuah solusi dari pemerintah daerah dan fasilitator dalam pelaksanaan program P2KP di masa yang akan datang
- c. Dalam melaksanakan koordinasi dan konfirmasi dijadwalkan secara berkala untuk mendukung pelaksanaan sinergisitas antar *stakeholder* yang baik

dengan tujuan Program PKH dan P2KP dapat berjalan dengan baik dan terealisasi sesuai dengan perencanaan yang sudah di tentukan

- d. Peran pemerintah daerah perlu memperhatikan secara keseluruhan yang terjadi baik PKH maupun P2KP dengan cara memberikan *reward* berupa penghargaan dan sanksi jika tidak memenuhi target dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 2009. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Banarjee, A.V., Benabou, R., dan Mookherjee, D., 2006. *Understanding Poverty*. New York: Oxford University Press.

Baswir, Revrison. 2007. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BPS.2019. *Pekembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonomi*. Publikasi susenas

BPS.2018. *Provinsi Lampung dalam Angka 2018*. BPS Provinsi Lampung

BPS.2019. *Bandar Lampung dalam Angka 2019*. BPS Bandar Lampung

BAPPENAS. 2007. *Pemantauan dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*, Deputy Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM BAPPENAS.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2010. *Pendataan Keluarga, Selayang Pandang*. Diakses 16 Oktober 2017 dari BKKBN. http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=49

Bradshaw, Ted K., 2005. *Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development*. Community Development: Journal of the Community Development Society, vol.38, No. 1.

Banarjee, A.V., Benabou, R., dan Mookherjee, D., 2006. *Understanding Poverty*. New York: Oxford University Press.

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. 2015. *Buku kerja Pendamping dan Operator PKH*.

Esmara, H., 2006. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia.

Kartasasmita, Ginanjar. 2007. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya

Sallatang, M.A. 2006. *Kemiskinan dan Mobilisasi Pembangunan*. Makalah, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Unhas